

# Daftar Isi

## Kata Pengantar v

## Daftar Isi ix

## Bab 1 Uang dan Kegiatan Ekonomi 1

### Pendahuluan 1

### Pengertian Uang 2

Definisi Uang Dilihat Dari Aspek Hukum 4

Definisi Uang Dilihat dari Aspek Fungsi 5

Uang: Dulu, Sekarang dan Masa Mendatang 6

### Kriteria Uang 6

Acceptability (Disukai Oleh Umum) 7

Stability of Value (Mempunyai Nilai Yang Stabil) 7

Elasticity of Supply 7

Portability, (Mudah Diangkut) 7

Durability, (Tidak Mudah Rusak) 8

Divisibility, (Mudah Dibagi-Bagi) 8

### Fungsi-Fungsi Uang 8

Alat Kesatuan Hitung (Unit of Account) 9

Alat Pertukaran (Medium of Exchange) 10

Alat Penyimpan Kekayaan (Store of Value) 11

Standard Pembayaran Masa Depan (Standard For Deferred Payment) 12

### Jenis dan Klasifikasi Uang 12

Berdasarkan Material 13

Berdasarkan Nilainya 13

Berdasarkan Lembaga Yang Menciptakannya 14

Berdasarkan Wilayah Berlakunya Uang 14

Peranan Uang Dalam Perekonomian 15

Bagaimana Mengenal Uang Anda 17

Uang Rupiah Indonesia (IDR) 17

Standard Kualitas Uang Rupiah 24

Kriteria Rupiah Layak Edar (LE) dan Rupiah Tidak Layak Edar (TLE) 25

Uang Rupiah Yang Dicabut dan Dapat Ditukarkan Kembali 26

Uang Rupiah Yang Dicabut dan Dapat Ditukarkan Kembali Hanya di Bank Indonesia 26

Penukaran Rupiah Tidak Layak Edar 29

Ciri-Ciri Uang Rupiah Palsu 30

Jenis Yang Berbahaya 30

Dollar Amerika Serikat (USD) 31

Ciri-Ciri Uang Dollar Amerika (US \$) Asli 31

Ciri-Ciri Dollar Amerika (US \$) Palsu 31

Modus Operandi Pengedaran Uang Palsu 32

Sumber Uang Palsu Di Dalam Negeri 32

Motivasi dan Dampak Pemalsuan Uang 32

Penanggulangan Masalah Pemalsuan Uang Di Indonesia 32



Dasar Hukum 33	
<i>Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Pasal-IX</i> 33	
<i>Koordinasi Antar Instansi (botasupal)</i> 33	
<i>Kepolisian</i> 33	
<i>Interpol</i> 33	
<i>Kejaksaan</i> 33	
<i>Bank Sentral (Bank Indonesia)</i> 33	
<i>Perum Peruri</i> 33	
<i>Assistensi Laboratorium</i> 34	
<i>Pencegahan Kejahatan Pemalsuan Uang</i> 34	
Sekilas Tentang Teori Hakikat Uang 34	
<b>Bab 2 Uang Beredar, Inflasi dan Kebijakan Moneter 37</b>	
Uang Beredar 37	
<i>Uang Beredar, Uang Kuasi dan Likuiditas Perekonomian</i> 37	
<i>Laju Pertumbuhan dan Posisi Uang Beredar</i> 39	
<i>Faktor yang Mempengaruhi Uang Beredar</i> 40	
<i>Rasio <math>M_1</math> dan Uang Kuasi Terhadap <math>M_2</math></i> 42	
<i>Uang Primer, Faktor yang Mempengaruhi dan Koefisien Likuiditas</i> 43	
<i>Peredaran Uang dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi</i> 43	
<i>Perkembangan Uang Beredar</i> 44	
<i>Komponen Uang Beredar</i> 45	
<i>Faktor Yang Mempengaruhi Uang Beredar</i> 48	
Inflasi 53	
Defenisi Inflasi 53	
Inflasi Sebagai Konsep Teori 54	
<i>Teori Kuantitas</i> 54	
<i>Teori Keynes</i> 55	
<i>Teori Strukturalis</i> 55	
<i>Pengelompokan Inflasi</i> 56	
<i>Menurut Parah Tidaknya Inflasi:</i> 57	
<i>Menurut Penyebab dari Inflasi</i> 57	
<i>Menurut Asal-usul Inflasi</i> 59	
<i>Menurut Sifat Inflasi</i> 59	
<i>Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)</i> 60	
Beberapa Implikasi Inflasi 61	
<i>Dampak Inflasi Terhadap Pendapatan</i> 61	
<i>Dampak Inflasi Terhadap Ekspor</i> 61	
<i>Dampak Inflasi terhadap Minat Masyarakat untuk Menabung</i> 62	
<i>Dampak Inflasi Terhadap Sektor Riil</i> 62	
Determinan Inflasi 64	
Koordinasi Pengendalian Inflasi 65	
<i>Tentang Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)</i> 65	
<i>Tugas dan Fungsi</i> 66	
<i>Susunan Keanggotaan</i> 67	
<i>Program/Agenda Kerja</i> 67	
<i>Tentang Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)</i> 68	
<i>Tugas dan Fungsi</i> 69	
<i>Susunan Keanggotaan</i> 69	
<i>Mekanisme Kerja dan Program Kerja</i> 69	
<i>Koordinasi Pengendalian Inflasi</i> 70	
Kebijakan Moneter 72	
Kebijakan Moneter Suatu Konsep Teoritik 72	
<i>Defenisi dan Klasifikasi Kebijakan Moneter</i> 72	
<i>Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia</i> 72	
<i>Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia</i> 73	
<i>Operasi Moneter oleh Bank Indonesia</i> 75	
<i>Bagaimana Bekerjanya Kebijakan Moneter?</i> 77	
Penyempurnaan Inflation Targeting Framework (Flexible ITF) 78	
Instrumen Operasi Moneter 82	
<i>Operasi Moneter Pasar Terbuka</i> 82	
<i>Operasi Moneter: Syariah</i> 83	
<i>Proyeksi Likuiditas</i> 84	
Penyempurnaan Operasi Moneter 84	
<i>Perpanjangan Profil Jatuh Waktu Sertifikat Bank Indonesia</i> 84	
<i>Perpanjangan Profil-Sertifikat Bank Indonesia (PP-SBI) Dilakukan dengan Tujuan</i> 85	
<i>Lelang SBI Dapat Memiliki Tenor Diluar Kebiasaan</i> 86	
<i>Paket Kebijakan Penguatan Manajemen Moneter dan Pengembangan Pasar Keuangan</i> 87	
<i>Transparansi dan Komunikasi</i> 88	
<i>Statement Kebijakan Moneter</i> 88	



### Bab 3 Lembaga Keuangan, dan Stabilitas Keuangan 91

A. Lembaga Keuangan	91
Pengertian dan Klasifikasi Lembaga Keuangan	91
Perantara ( <i>The Intermediation Role</i> )	92
Pembayar ( <i>The Payments Role</i> )	92
Penjamin ( <i>The Guarantor Role</i> )	93
Wakil ( <i>The Agency Role</i> )	93
Kebijakan ( <i>The Policy Role</i> )	93
Pengalihan Aset ( <i>Asset Transmutation</i> )	93
Realokasi Pendapatan ( <i>Income Reallocation</i> )	94
Transaksi ( <i>Transaction</i> )	94
B. Stabilitas Keuangan	97
Apa Yang Dimaksud Stabilitas Sistem Keuangan	98
Faktor-Faktor Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan	98
Perbedaan Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan	98
Mengapa Stabilitas Sistem Keuangan Itu Penting	99
Pihak-Pihak Yang Bertanggung jawab Terhadap SSK	101
Peran Bank Sentral Dalam SSK	101
Stabilitas Keuangan Sebagai Tujuan Eksplisit Bank Sentral di Beberapa Negara	102
<i>Bank of Canada</i>	102
<i>Bank of England (BOE)</i>	102
<i>Bank of Japan (BoJ)</i>	103
<i>European Central Bank (ECB)</i>	103
<i>Reserves Bank of New Zealand (RBNZ)</i>	103
Dua Pendekatan: Makroprudensial dan Mikroprudensial	103
Peran Bank Indonesia Dalam Memelihara SSK	104
Strategi 1. Pemantapan Regulasi dan Standar dan Disiplin Pasar.	104
Strategi 2. Peningkatan Riset dan Surveillance	105
Strategi 3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama.	107
Strategi 4. Penetapan Jaring Pengaman dan Krisis Manajemen.	108
Apa Yang Telah Bank Indonesia Lakukan	108
Tahun 2003	108
Tahun 2004	109
Tahun 2005	110
Tahun 2006	110

Tantangan ke Depan	110
Arah Kebijakan Sistem Pembayaran	111

### Bab 4 Bank Sentral 115

Sejarah Bank Indonesia	115
Kelembagaan	115
Moneter	116
Perbankan	116
Sistem Pembayaran	117
Dewan Gubernur Bank Indonesia	118
Larangan Bagi Anggota Dewan Gubernur	119
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dewan Gubernur	119
Rapat Dewan Gubernur	120
Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Gubernur	120
Pengambilan Keputusan Bank Indonesia	121
Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara	121
Hubungan Bank Indonesia Dengan Pemerintah:	
Hubungan Keuangan	122
Hubungan Bank Indonesia Dengan Pemerintah:	
Independensi Dalam Interdependensi	122
Kerjasama Bank Indonesia Dengan Lembaga Lain	122
Struktur Organisasi Bank Indonesia	123
Hubungan Kerjasama Internasional Yang Dilakukan Bank Indonesia	124
Status dan Kedudukan Bank Indonesia	126
Lembaga Negara Yang Independen	126
Sebagai Badan Hukum	128
Kedudukan Bank Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan RI	128
Esensi dan Implikasi dari Status dan Kedudukan Bank Indonesia	128
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia	129
Tujuan Bank Indonesia	129
Tugas Bank Indonesia	129
Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter	129
Peran Bank Indonesia Sebagai <i>Lender of The Last Resort</i>	130
Kebijakan Nilai Tukar	130



<i>Kewenangan Dalam Mengelola Cadangan</i>		<b>Bab 5 Kliring Bank Indonesia 159</b>
<i>Devisa</i> 131		<i>Kliring di Indonesia</i> 159
<i>Penyelenggaraan Survei</i> 131		<i>Sekilas Sejarah Kliring di Indonesia</i> 162
<i>Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem</i>		<i>Kegiatan-Kegiatan Dalam Kliring</i> 164
<i>Pembayaran</i> 131		<i>Sistem Kliring</i> 166
<i>Pengaturan Dan Penyelenggaraan Kliring Serta</i>		<i>Sistem Manual</i> 167
<i>Penyelesaian Akhir Transaksi</i> 132		<i>Sistem Semi Otomasi (SOKL)</i> 168
<i>Mengeluarkan Dan Mengedarkan Uang</i> 132		<i>Kriteria SOKL</i> 168
<i>Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank</i> 132		<i>Keuntungan Penyelenggaraan Kliring SOKL</i> 169
<i>Pengalihan Tugas Pengawasan Bank</i> 133		<i>Sistem Otomasi</i> 169
<i>Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian</i>		<i>Kegiatan Kliring Otomasi</i> 171
<i>Inflasi</i> 134		<i>Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)</i> 175
<i>Kerangka Kebijakan Operasi Pasar Terbuka</i>		<i>Prinsip Umum SKNBI</i> 175
<i>(OPT)</i> 138		<i>Karakteristik SKNBI</i> 176
<i>Operasi Pasar Terbuka</i> 139		<i>Warkat, Dokumen Kliring, DKE dan Pencetakan</i>
<i>Definisi Operasi Pasar Terbuka</i> 139		<i>Warkat</i> 182
<i>Pencapaian Target Operasi Pasar Terbuka</i> 139		<i>Warkat</i> 182
<i>Instrumen Operasi Pasar Terbuka</i> 139		<i>Jenis Warkat Kliring</i> 182
<i>Fasilitas Pendanaan</i> 144		<i>Dokumen Kliring</i> 188
<i>Sarana Pendukung Operasi Pasar Terbuka</i> 144		<i>Penyelenggara Kliring</i> 191
<i>Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan</i> 146		<i>Bank Indonesia Sebagai Penyelenggara Kliring</i> 192
<i>Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan</i> 148		<i>Pihak Lain Sebagai Penyelenggara Kliring</i>
<i>Misi dan Tujuan</i> 148		<i>(Bank)</i> 192
<i>Strategi</i> 149		<i>Biaya Kliring</i> 193
<i>Pencegahan Krisis</i> 150		<i>Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring Non</i>
<i>Manajemen Krisis</i> 150		<i>SKNBI</i> 193
<i>Daftar Bank Sentral Dunia</i> 151		<i>Biaya Kliring pada Penyelenggaraan Kliring</i>
<i>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i> 153		<i>SKNBI</i> 195
<i>Misi dan Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i> 153		<i>Jadwal Kliring</i> 197
<i>Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan</i>		<i>Daftar Hitam</i> 198
<i>(OJK)</i> 153		<i>Pendahuluan</i> 198
<i>Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i> 154		<i>Jenis Alasan Penolakan Cek/Bilyet Giro (BG)</i> 199
<i>Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan</i>		<i>Kriteria Penutupan Rekening</i> 201
<i>(OJK)</i> 154		<i>Penatausahaan Daftar Hitam</i> 201
<i>Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i> 154		
<i>Pengalihan Fungsi Perbankan dari Bank Indonesia (BI)</i>		<b>Bab 6 Bank Umum 203</b>
<i>ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i> 155		<i>Pengertian dan Fungsi Bank Umum</i> 203
<i>Latar Belakang Pengalihan Fungsi Pengaturan dan</i>		<i>Agent of Trust</i> 205
<i>Pengawasan Perbankan</i> 155		<i>Agent of Development</i> 205
<i>Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka</i>		<i>Agent of Service</i> 206
<i>Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas</i>		<i>Pengelompokan Bank Umum</i> 206
<i>Jasa Keuangan (OJK)</i> 155		<i>Dilihat dari Aspek Fungsi</i> 206
<i>Pembentukan Tim Transisi</i> 156		<i>Dilihat dari Status Kepemilikan</i> 207
<i>Pengawasan Terintegrasi</i> 156		



- Dilihat dari Kegiatan Operasional 207
- Dilihat Berdasarkan Penciptaan Uang Giral 208
- Dilihat Berdasarkan Sistem Organisasi 208
- Dilihat Menurut Skala Usaha Atau Target
- Pasar 211
- Menurut Geografis 211
- Risiko-Risiko dalam Usaha Perbankan 212
- Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*) 213
- Risiko Tingkat Bunga (*Interest Rate Risk*) 213
- Risiko Kredit (*Credit Risk*) 213
- Risiko (*Management Risk*) 213
- Risiko Investasi (*Investment Risk*) 213
- Risiko Operasi (*Operating Risk*) 213
- Risiko Fidusia (*Fiduciary Risk*) 214
- Resiko Keamanan (*Solvency Risk*) 214
- Risiko Pendapatan (*Earning Risk*) 214
- Resiko Pasar (*Market Risk*) 214
- Jenis-jenis Kantor Bank 214
- Kantor Pusat Non-Operasional (KPNO) 214
- Kantor Pusat Operasional (KPO) 214
- Kantor Cabang 215
- Kantor Cabang Pembantu 215
- Kantor Perwakilan 215
- Kantor Perwakilan Bank Asing 215
- Kantor Kas 215
- Kas Mobil 215
- Kas Terapung 215
- Bank Umum dalam Sistem Perbankan Indonesia 215
- Perkembangan Perbankan 217
- Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank 217
- Perkembangan Dana dan Kredit Bank 219
- Ketentuan Kehati-hatian Bank Umum
- Konvensional 222
- Modal Inti Bank Umum 222
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Ketentuan KPM bagi Bank Umum
- Konvensional 223
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 224
- Kualitas Aktiva Bank Umum 225
- Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) 226
- Restrukturisasi Kredit 226
- Giro Wajib Minimum (GWM) 227
- Contoh Perhitungan GWM Dalam Rupiah 227
- Contoh Perhitungan Sanksi 229
- Tata Cara Perhitungan GWM Sekunder Dalam Rupiah 230
- Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) 232
- Transparansi Kondisi Keuangan Bank Bank Umum 233
- Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 233
- Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum 234
- Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum 235
- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 235
- Perkembangan Perbankan 236
- Aktiva (*Assets Management*) 237
- Pasiva (*Liability Management*) 237
- Neraca (*Balance Sheet Management*) 238
- Penyesuaian Organisasi Perbankan 238
- Organisasi Yang Berorientasi Produk 238
- Organisasi Yang Berorientasi Nasabah 238
- Manajemen Kantor Cabang 241
- Mengapa Suatu Cabang Didirikan 241
- Ada Beberapa Alasan Untuk Membuka Suatu Cabang 241
- Pro dan Kontra Dalam Pengembangan Jaringan Cabang 242
- Sistem Perbankan di Indonesia 243
- Pertama 243
- Kedua 244
- Ketiga 244
- Strategi Pengembangan Jaringan Kantor Cabang 244
- Cabang Penuh 245
- Kantor Cabang Pembantu 245
- Kantor Cabang Keliling 245
- Kantor Agen 245
- Jenis Saluran Distribusi Lainnya 246
- Pertimbangan Dasar Dalam Merumuskan Strategi Pengembangan Jaringan Kantor Cabang 247
- Pola Pengelolaan Jaringan Kantor Cabang 249
- Konsep Biaya Marjinal 251
- Tantangan Manajemen Bank Umum Dalam Mengembangkan Sistem Informasi 252
- Tahap-I (*Initial*) 253



- Tahap-II (Expansion) 253  
 Tahap-III (Control) 253  
 Tahap-IV (Integration) 253  
 Tahap-V, (Data Administration) 253  
 Tahap-VI (Maturity) 254
- Dampak Teknologi Terhadap Organisasi  
 Perbankan 255  
 Rancang Bangun Teknologi Proses Informasi 255  
 Sentralisasi Proses Informasi (Centralized Processing) 255  
 Distribusi Proses Informasi (Distributed Processing) 256  
 Desentralisasi Proses Informasi (Decentralized Processing) 257  
 Pemilihan Rancang Bangun Sistem Informasi 258
- Bab 7 Usaha Pokok Bank Umum 261**
- Tabungan (Saving Deposit) 261  
 Perhitungan Bunga Tabungan 262  
 Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Bunga Harian 263  
 Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Rata-Rata 263  
 Sedangkan Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Terendah 264  
 Tugas-tugas Bagian Tabungan 264  
 Menerima Setoran Tunai atau Cek atau Bilyet Giro Cabang Sendiri. 264
- Tabunganku 266  
 Definisi Produk Tabunganku 266  
 Fitur Produk Tabunganku 266
- Simpanan Deposito (Saving Deposit) 269  
 Deposito Berjangka (Time Deposit) 270  
 Deposito Harian (Deposit on call) 272  
 Sertifikat Deposito (Certificate of Deposit) 273  
 Manfaat Penempatan Dana Deposito 274  
 Keuntungan Bagi Bank 274  
 Keuntungan Bagi Nasabah 276
- Jasa Giro (Demand Deposit) 276  
 Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Giro 277  
 Instrumen Yang Digunakan Untuk Menarik Dana  
 Giro 278  
 1. Cek (Cheque) 278  
 2. Bilyet Giro 282
- Surat Perintah Pembayaran Lainnya 282  
 Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) 285  
 Kredit (Loan) 286  
 Pengertian Kredit 287  
 Definisi Kredit Menurut Dasar Kata 289  
 Klasifikasi Kredit 290  
 Menurut Jangka Waktu 290  
 Menurut Tujuan 291  
 Menurut Bentuk Jaminan 291  
 Menurut Penggunaannya 291
- The Six C's of Credit 292  
 Character (Kepribadian) 293  
 Capacity atau Ability To Pay (Kemampuan Membayar) 293  
 Capital (Modal Calon Debitur) 294  
 Condition of Economy (Kondisi Ekonomi Suatu Negara) 294  
 Collateral (Jaminan) 294
- Kredit Sebagai Usaha Pokok Perbankan 295  
 Kebijaksanaan Umum 295  
 Kebijakan Tahunan 296  
 Penyusunan Target Pasar 297  
 Strategi Pemasaran 297  
 Anggaran 297  
 Ketentuan Mengenai Harga 297
- Perkembangan Kredit Perbankan 298  
 Masalah Penilaian Perkreditan 303  
 Tujuan dari Penggunaan Kredit. 303  
 Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Suatu Negara 304  
 Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan (Calon Debitur) 304  
 Kemampuan Perusahaan dalam Mengembalikan Kredit dan Bunga yang Diperhitungkan Tepat Pada Waktunya 303  
 Kemungkinan Pelaksanaan Pengawasan Atas Penggunaan Kredit Yang Diberikan 304  
 Riwayat Hidup Calon Debitur 304  
 Ketergantungan Perusahaan Terhadap Jasa Konsultan 305  
 Keterbukaan Atau Kejujuran Calon Debitur 305  
 Adanya Keinginan Dari Debitur Untuk Mempercepat Proses Pemutusan Kredit 305



Permohonan Atau Pemberian Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Sesungguhnya	306	Jenis Kartu Kredit	328
Persoalan Manajemen	306	Wilayah Berlaku	328
Kondisi dan Potensi Perusahaan	306	Cara Pembayaran	328
Fungsi Kredit Bank	307	Pihak-pihak yang Terlibat dalam Kartu Kredit	329
Meningkatkan Daya Guna Dari Uang	307	Mekanisme Transaksi Dengan Kartu Kredit	329
Meningkatkan Daya Guna Dari Barang	307	Manfaat Kartu Kredit	330
Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi	307	1. Bagi Pemegang Kartu Kredit	330
Meningkatkan Kegairahan Usaha Masyarakat	308	2. Bagi Penerima Transaksi Kartu Kredit Atau Pedagang	331
Meningkatkan Pendapatan Nasional	308	3. Bagi Bank Penerbit Kartu Kredit	331
Meningkatkan Hubungan Internasional	308	Ketentuan Umum Bagi Pemegang Kartu Kredit	333
Tujuan Pengawasan Kredit	308	Individu atau Perorangan	333
Proses Pengawasan Kredit	310	Pedagang atau Pengusaha	333
Menetapkan Kriteria Pengawasan	310	Mekanisme Penerbitan, Pelayanan dan Penagihan Kartu Kredit	333
Menetapkan Standar Pengawasan	311	Mitigasi Risiko Kartu Kredit	334
Melakukan Usaha-Usaha Preventif	311	Automatic Teller Machine (ATM)	335
Melakukan Proses Penilaian	311	Beberapa Jaringan Automatic Teller Machine (ATM)	336
Metoda Pengawasan Kredit	311	Off Line	336
Sales Request for Credit Information	312	Stand Alone	336
Customer-Supplied Information	312	On line (ATM integrated)	336
Informasi Bank	312	ATM Sharing	337
Informasi Dunia Perdagangan (Trade Information)	312	Electronic Fund Transfer System (EFTS)	337
Credit Interchange Bureaus	313	Full Teller System	337
Industry Credit Groups	313	Jenis Mesin ATM	338
Credit Reporting Agencise	313	ATM Mesin	338
Direct Interchange	314	ATM Non Tunai	338
Other Sources of Credit Information	314	Drive Thru	339
Sistem Monitoring	314	Manfaat ATM	339
Cara-cara Perhitungan Bunga Kredit	317	Perkembangan Kartu ATM dan Kartu Debet	340
Metode Efektif atau metoda Sliding	317	Kasus Fraud Pada Kartu ATM dan ATM/Debet	343
Metode Anuitas	318	Inkaso (Collection Order)	344
Metode Flat	319	Prosedur Inkaso Dalam Negeri	345
Hal-hal Yang Perlu Diketahui	319	Garansi Bank (Guarantee Bank)	345
<b>Bab 8 Usaha Bank Umum Lainnya 321</b>		Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Penerima Bank Garansi	348
Transfer (Payment Order)	321	Bagi Pihak Yang Dijamin Bank Garansi	348
Pengertian	324	Kotak Pengaman (Safety Deposit Box)	348
Tujuan BI-RTGS	324	Peralatan Penunjang Safe Deposit Box	351
Mekanisme Settlement Saat Ini	324	Vault Door	351
Risiko-Risiko Sistem Pembayaran	325	Time Lock	352
Karakteristik Sistem BI-RTGS	326	Emergency Vault Ventilator	352
Kartu Kredit (Credit Card)	326	Automatic Fire Detector	352



- Hak dan Tanggung Jawab Bank 352
- Upaya Bank Dalam Menarik Minat Nasabah *Safe*  
*Deposit Box* 353
- Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam *Safe*  
*Deposit Box* 353
- Alternatif Pemecahan Hambatan 353
- Cek Perjalanan (*Travellers Cheque*) 354
- Pihak-pihak dalam *Travellers Cheque* 355
- Keuntungan yang Diterima oleh Pelaku *Travellers*  
*Cheque* 355
- Prosedur Penjualan *Travellers Cheque* 356
- Prosedur Pembelian *Travellers Cheque* 356
- Kredit Dokumenter (*Documentary Letter of*  
*Credit*) 358
- Pengertian* 358
- Manfaat Letter of Credit* 359
- Fungsi Letter of Credit* 359
- Pihak-pihak yang Terlibat dalam Letter of*  
*Credit* 360
- Jenis-jenis Letter of Credit* 361
- Letter of credit Menurut Sifatnya* 361
- Letter of credit Menurut Jangka Waktu*  
*Pembayarannya* 364
- Letter of credit Menurut Bank Yang*  
*Menegosiasi* 365
- Electronic Banking (e-banking)* 365
- Pendapatan Non Bunga 367
- Butuh Investasi Besar 367
- Layanan Pada Nasabah (*Customer service*) 368
- Front Line Office* 369
- Liasson Officer* 369
- Information Centre* 369
- Salesman* 370
- Servicing* 370
- Advicer atau Konsultan* 370
- Maintanance Customer* 370
- Handling Complaint* 370
- One Stop Banking* 371
- Kualifikasi Personil Customer service* 371
- Tugas dan Wewenang *Customer service* 371
- Tugas-tugas* 371
- Wewenang* 373
- Bentuk Layanan Jasa Giralisasi Bank Umum 374
- Permohonan Referensi Bank* 374
- Permohonan Pembuatan Surat Perintah Pembayaran*  
*(Standing Instruction)* 374
- Permohonan Perubahan Tanda Tangan* 374
- Permohonan Perubahan Pengiriman Salinan*  
*Rekening Koran* 375
- Permohonan Pembatalan Pencairan Atau*  
*Pembayaran (Stop Payment Order)* 375
- Permohonan Giralisasi* 375
- Bab 9 Bank Perkreditan Rakyat 377**
- Sejarah Singkat BPR 377
- Pengertian BPR 378
- Fungsi Kegiatan Usaha BPR 378
- Larangan Kegiatan Usaha BPR 379
- Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR 379
- Ketentuan-ketentuan Pokok BPR 380
- Ketentuan Kelembagaan 380
- Pendirian BPR* 380
- Kepemilikan BPR* 380
- Kepengurusan BPR* 381
- Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR* 382
- Pembukaan Kantor* 382
- Kegiatan Kas di Luar Kantor* 383
- Pemindahan Alamat Kantor* 383
- Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum* 383
- Penutupan Sementara* 384
- Perubahan Kegiatan Usaha* 385
- Ketentuan Kehati-hatian 385
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum*  
*(KPMM)* 385
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)* 385
- Aktiva Produktif* 386
- Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)* 387
- Restrukturisasi Kredit* 389
- Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your*  
*Customer)* 389
- Ketentuan Tentang Tingkat Kesehatan BPR 390
- Ketentuan Exit Policy 390
- Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam*  
*Status Pengawasan* 390
- Ketentuan Lain-lain 392
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*  
*Perbankan* 392
- Laporan-laporan BPR 393



<i>Laporan Bulanan</i>	393	<i>Tabungan Syariah</i>	425
<i>Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)</i>	394	<i>Deposito Syariah</i>	426
<i>Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)</i>	394	Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	432
<i>Laporan Keuangan Publikasi</i>	394	<i>Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah</i>	433
<i>Laporan Pengaduan Nasabah</i>	394	Prinsip Kehati-hatian Bank Umum Syariah	434
<i>Laporan Rencana Kerja Dan Pelaksanaan Rencana Kerja</i>	394	<i>Ketentuan KPMM Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah</i>	434
<i>Laporan Keuangan Tahunan (LKT)</i>	395	<i>Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah</i>	434
<i>Laporan Struktur Kelompok Usaha</i>	395	<i>Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Syariah</i>	435
<i>Laporan Lainnya</i>	395	<i>Restruktisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS</i>	435
Arah Kebijakan Pengembangan BPR 2014	395	<i>Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Syariah</i>	436
1. Model Bisnis BPR	396	<i>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS)</i>	436
2. Mendorong Kerjasama Apex BPR	397	Kinerja Bank Umum Syariah	437
Pengembangan BPR	397	<i>Industri perbankan syariah tetap meningkat dengan kinerja yang baik</i>	437
Memperkuat Kelembagaan	398	<i>Pertumbuhan bank umum syariah lebih cepat dibandingkan bank umum konvensional</i>	437
Kredit MKM Terutama Untuk Tujuan Konsumsi	398	<i>FDR Semakin Baik</i>	437
Perkembangan Kredit BPR	400	<i>Risiko Pembiayaan Menurun</i>	438
Peningkatan Permodalan di Indonesia	403	<i>Profitabilitas Meningkat</i>	438
Penyebaran BPR di Seluruh Indonesia	404	<i>Permodalan Tetap Memadai Meskipun Menurun</i>	438
Perluasan Jaringan Kantor	406	<i>Pembiayaan BUS didominasi UMKM</i>	438
Peningkatan Kerjasama BPR dengan Bank Umum/Lembaga Lain (Linkage Program)	408	Menindaklanjuti Implementasi UU Perbankan syariah	438
Meningkatkan Kualitas Pengaturan	409	<i>Meningkatkan Kompetensi Pelaku dan Pengawas Perbankan</i>	442
Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan	409	<i>Meningkatkan Daya Saing Pasca Krisis Keuangan Global</i>	442
Mendorong Kualitas Tata Kelola (Governance), Menejemen dan Operasional yang Sehat dan Profesional	412	<i>Menyempurnakan Peraturan Mengenai Manajemen Risiko</i>	443
Memberdayakan Infrastruktur Pendukung Industri BPR yang Efektif	413	<i>Memperkuat Permodalan</i>	443
Lembaga Apex	413	<i>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian</i>	443
Lembaga Sertifikasi Profesi	414	UU No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen UU PPN dan PPNBM: <i>Tax Neutrality</i> Bagi Keuangan Syariah Yang Memberikan Harapan Pertumbuhan	443
Meningkatkan Kapasitas BPR	414	Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah 2014	445
Mewujudkan Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah	415		
Penerapan KYC/AML BPR cukup baik.	415		
<b>Bab 10 Bank Syariah 417</b>			
Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia	417		
Prinsip Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah	420		
Prinsip Kegiatan Usaha UUS	422		
Produk Bank Syariah	424		
Giro Syariah	424		



<i>Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah</i>	446	<i>Agenda Peningkatan Pelaksanaan Governance</i>	
<i>Arah Pengembangan Perbankan Syariah</i>	447	<i>BPD</i>	463
<b>Bab 11 Arah Kebijakan Perbankan</b>	<b>449</b>	<i>Agenda Peningkatan Peran BPD di dalam</i>	463
<i>Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2014</i>	449	<i>Membangun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia</i>	
<i>Arsitektur Perbankan Indonesia</i>	450	<i>(ASKI)</i>	464
<i>Overview Tentang Arsitektur Perbankan</i>		<i>Antisipasi Menghadapi Gangguan Besar terhadap</i>	
<i>Indonesia</i>	452	<i>Kelangsungan Sistem Keuangan (Financial System</i>	
<i>Enam Pilar API</i>	455	<i>Continuity Planning)</i>	466
<i>Tantangan ke Depan</i>	456	<i>Koordinasi</i>	467
<i>Kapasitas Pertumbuhan Kredit Perbankan Yang</i>		<i>Pengawasan Bank</i>	467
<i>Masih Rendah</i>	456	<i>Prosedur Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Dalam</i>	
<i>Struktur Perbankan Yang Belum Optimal</i>	456	<i>Pengawasan Khusus</i>	470
<i>Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terhadap</i>		<i>Mandatory Supervision Action</i>	473
<i>Pelayanan Perbankan Yang Dinilai Oleh</i>		<i>Implementasi Kerangka Kecukupan Modal Bank Umum</i>	
<i>Masyarakat Masih Kurang</i>	457	<i>Sesuai BASEL-II Di Indonesia</i>	473
<i>Pengawasan Bank Yang Masih Perlu</i>		<i>Sekilas Implementasi Basel II</i>	473
<i>Ditingkatkan</i>	457	<i>Memaksimalkan Manfaat Implementasi Basel</i>	
<i>Kapabilitas Perbankan Yang Masih Lemah</i>	457	<i>II</i>	475
<i>Profitabilitas dan Efisiensi Operasional Bank Yang</i>		<i>Dampak Implementasi Basel II Terhadap Ketahanan</i>	
<i>Tidak Sustainable</i>	458	<i>Sistem Perbankan</i>	476
<i>Perlindungan Nasabah Yang Masih Harus</i>		<i>Rencana Implementasi Basel II di Perbankan</i>	
<i>Ditingkatkan</i>	458	<i>Indonesia</i>	478
<i>Perkembangan Teknologi Informasi</i>	458	<i>Implementasi Basel II di Negara Lain</i>	479
<i>Program Kegiatan API</i>	458	<i>Permodalan Bank</i>	480
<i>Program Penguatan Struktur Perbankan</i>		<i>Rasio Kecukupan Modal (CAR)</i>	480
<i>Nasional</i>	459	<i>Definisi Dari Regulatory Capital</i>	480
<i>Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi A Pasar</i>		<i>Rasio Modal Minimum</i>	481
<i>Sekunder (Secondary Market)</i>	459	<i>Bobot Risiko</i>	481
<i>Program Peningkatan Kualitas Pengaturan</i>		<i>Evolusi Basel II</i>	482
<i>Perbankan</i>	460	<i>Basel Capital Accord</i>	482
<i>Program Peningkatan Fungsi Pengawasan</i>	460	<i>Pemahaman Tambahan Tentang BIS</i>	489
<i>Program Peningkatan Kualitas Manajemen Dan</i>		<i>Sekilas Implementasi Basel II</i>	492
<i>Operasional Perbankan</i>	461	<i>Memaksimalkan Manfaat Implementasi Basel</i>	
<i>Program Pengembangan Infrastruktur</i>		<i>II</i>	493
<i>Perbankan</i>	461	<i>Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</i>	494
<i>Program Peningkatan Perlindungan Nasabah</i>	461	<i>Tindak Pidana Pencucian Uang (Money</i>	
<i>Bank Pembangunan Daerah sebagai Regional</i>		<i>Laundering)</i>	494
<i>Champion</i>	461	<i>Pencucian Uang</i>	494
<i>Agenda Penguatan Permodalan BPD</i>	462	<i>Transaksi Keuangan Mencurigakan</i>	494
<i>Agenda Perluasan Akses Keuangan Masyarakat</i>	462	<i>Hasil Tindak Pidana</i>	495
<i>Agenda Penguatan Struktur Pendanaan BPD</i>	463	<b>Bab 12 Pasar Modal</b>	<b>497</b>
<i>Agenda Peningkatan Kualitas BPD</i>	463	<i>Pengertian Pasar Modal</i>	497
		<i>Segmen Pasar</i>	497



Sejarah Perkembangan	498	Bagaimanakah Kita Mendapatkan Keuntungan Dari	
Pengelolaan	499	<i>Stock Options?</i>	522
Badan Pembina Pasar Modal	499	<b>Bab 13 Pasar Uang dan Pasar Valas</b>	<b>525</b>
Badan Pengawas Pasar Modal	500	Pengertian Dasar	525
Pasar Perdana dan Sekunder	500	Kebutuhan Adanya Pasar Uang	526
Pasar Perdana ( <i>Primary Market</i> )	500	Tujuan dan Fungsi Pasar Uang	527
Pasar Sekunder ( <i>Secondary Market</i> )	501	Jenis Transaksi di Pasar Uang	527
Pelaku Pasar Modal	501	Pasar Uang Antar Bank	527
Emiten	501	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	528
Investor	501	Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)	528
Penjamin/Emisi ( <i>Underwrite</i> )	501	Sertifikat Deposito	528
Agen Penjualan	502	Pasar Valuta Asing	528
Penanggung ( <i>Gurantor</i> )	502	Pelaku di Pasar Uang	528
Wali Amanat ( <i>Trustee</i> )	502	Karakteristik Pasar Uang	528
Pialang/Broker	502	Instrumen Pasar Uang	529
Biro Administrasi Efek (BAE)	503	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	529
Tempat Penitipan Harta	503	Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)	530
Praktek Manipulasi Harga Saham di Bursa Saham	504	Sertifikat Deposito	530
Sekilas Tentang Reksadana	504	<i>Commercial Paper</i>	530
Karakteristik Investor dan Industri Reksadana	508	<i>Call Money</i>	530
Obligasi	511	<i>Repurchase Agreement</i>	530
Dari Sisi Penerbit	511	<i>Banker's Acceptance</i>	530
Dari Sisi Hak Penukaran	511	Indikator Pasar Uang	530
Dari sisi Jaminan	511	Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (Rp)	530
Karakteristik Obligasi	512	Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank (Rp)	531
Harga Obligasi	512	Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (US\$)	531
Stock Options	513	Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank	
Sejarah Singkat Dari <i>Stock Options</i>	514	(US\$)	531
Call Dan Put Options	515	JIBOR ( <i>Jakarta Interbank Offered Rate</i> )	531
Spesifikasi Dari Kontrak <i>Stock Options</i>	516	Suku Bunga Deposito Rupiah (%/Th)	531
Jenis Dari Opsi: Apakah Itu Adalah <i>Call Option</i> Atau		Suku Bunga Deposito US\$ (%/Th)	531
Put Option	517	Nilai Tukar Rupiah (Kurs)	531
Pihak-Pihak Di Dalam Transaksi <i>Stock</i>		Suku Bunga Kredit	531
Options	517	Inflasi	531
Jenis-Jenis Dari <i>Stock Options</i>	517	Indeks Harga Konsumen (IHK)	531
Gaya-Gaya Dari <i>Stock Options</i>	518	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	532
Keuntungan Daripada Perdagangan <i>Stock</i>		Jenis-Jenis Risiko Investasi di Pasar Uang	532
Options	518	Risiko Pasar ( <i>Interest Rate Risk</i> ),	532
Keuntungan Dari <i>Stock Options</i>	519	Risiko Reinvestment,	532
Perlindungan Dari <i>Stock Options</i>	520	Risiko Gagal Bayar ( <i>Default Risk</i> Atau <i>Credit</i>	
Kefleksibilitas Dari <i>Stock Options</i>	521	Risk),	532
Risiko Dari <i>Stock Options</i>	521	Risiko Inflasi ( <i>Risiko Daya Beli</i> Atau <i>Purchasing</i>	
Bagaimanakah Menentukan Harga <i>Stock</i>		Power Risk).	532
Options?	521		



- Risiko Politik, 532  
 Marketability atau Liquidity Risk, 532  
 Kelebihan dan Kelemahan Pasar Uang 533  
 Kelebihan Pasar Uang 533  
 Kelemahan/Risiko Pasar Uang 533  
 Surat Berharga 533  
 Treasury Bills (T-Bills) 533  
 Commercial Paper 534  
 Sertifikat Deposito Atau Negotiable Certificate Of Deposit (CD) 535  
 Banker's Acceptance (BA) 535  
 Bill of Exchange 536  
 Repurchase Agreement (Repo) 536  
 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 536  
 Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 537  
 Call Money (Interbank Call Money Market) 538  
 Obligasi Negara Ritel (ORI) 538  
 Prosedur Investasi pada ORI 539  
 Mekanisme Pembayaran Kupon dan Pokok 539  
 Pajak Obligasi Negara Ritel 539  
 Kerahasiaan Data Pemilik 540  
 Penerbitan ORI-001 Tahun 2006 540  
 Pasar Uang Internasional 541  
 Pasar Euro (Eurocurrency Market) 541  
 Karakteristik Eurocurrency Market 542  
 Pasar Valuta Asing (Forex Market) 542  
 Pihak-Pihak Dalam Pasar Valas 543  
 Pemerintah 544  
 Bank Sentral 544  
 Bank Internasional 544  
 Lembaga Keuangan Lainnya 544  
 Nasabah Besar dan Kecil 545  
 Tujuan Transaksi Valuta Asing 545  
 Komersial 545  
 Funding 545  
 Hedging 545  
 Investasi 545  
 Individu 545  
 Market Making 545  
 Position Taking 546  
 Bentuk Kegiatan Perdagangan Pasar Forex 546  
 Untuk Pembayaran Ekspor dan Impor 546  
 Perdagangan Foreign Exchange (Forex) 546  
 Forward Trading 547  
 Spot Dan Swap 547  
 Aktivitas Foreign Exchange dalam Business dan Tindakan Pengendalian oleh Pemerintahan 547  
 Arbitrage 548  
 Trading Arbitrage 548  
 Interest Rate Arbitrage 548  
 Investment Arbitrage 549  
 Campur Tangan Pemerintah dalam Pasar 549  
 Exchange Control 549  
 Market Operation 550  
 Risiko yang Dihadapi 550  
 Faktor Fundamental 551  
 Faktor Teknis 551  
 Faktor Psikologis 551  
 Kebijakan Umum 552  
 Strategi Petunjuk 553  
 Prosedur dan Pengendalian 554  
 Proses Penetapan Limit dan Kewenangan Dealer 555  
 Pertama 556  
 Kedua 556  
 Ketiga 556  
 Keempat 556  
 Metode Penetapan Limit 557  
 Atas Dasar Volume Open Position (Volume Based Limits) 557  
 Atas Dasar Volatility (Volatility Based Limits) 558  
 Stop Loss Limit: Management Action Trigger (MAT) 559  
 Window Dressing Limit 559  
 Spesialisasi 560  
 Eurobond Market 561  
 Posisi Valuta Asing 561  
 Pengertian Posisi 561  
 Tujuan Posisi 561  
**Bab 14 Sewa Guna Usaha 563**  
 Pendahuluan 563  
 Manfaat Pembiayaan Sewa Guna Usaha 564  
 Macam Sewa Guna Usaha 565  
 Pihak-pihak Terkait (Kep. Menkeu No. 1169/KMK.01/1991) 567  
 Bentuk-bentuk Perusahaan Leasing 567  
 Independent Lessor 567



<i>Captiae Lessor</i>	567	Jenis-Jenis Anjak Piutang	578
<i>Lease Brokcer atau Package</i>	567	<i>Full Service Factoring</i>	578
Bentuk Pembiayaan <i>Leasing</i>	568	<i>Recourse Factoring</i>	578
<i>Financial Lease</i>	568	<i>Bulk Factoring</i>	579
<i>Leveraged Lease</i>	569	<i>Maturity Factoring</i>	579
<i>Cross Border Lease</i>	569	<i>Agency Factoring</i>	579
<i>Operating Lease</i>	570	<i>Invoice Factoring</i>	579
<i>Sales and Lease Back</i>	570	<i>Undisclosed Factoring</i>	579
Cara Pembayaran <i>Leasing</i>	571	Lima Aspek Klien Yang Dinilai Anjak Piutang	579
<i>Pembayaran di Muka</i>	571	Lima Aspek Anjak Piutang Yang Dinilai Klien	579
<i>Pembayaran di Belakang</i>	571	Kriteria Pemberian Fasilitas Anjak Piutang	580
Finance Lease	572	<i>Anjak Piutang</i>	580
<i>Persyaratan</i>	572	<i>Dengan Pembiayaan (Financing Service)</i>	581
<i>Masa Sewa Guna Usaha, Sekurang-kurangnya</i>	572	<i>Tanpa Pembiayaan (Non Financing)</i>	581
<i>Perpajakan</i>	572	<i>Jenis Kegiatan Anjak Piutang</i>	582
<i>Akuntansi</i>	572	<i>Anjak Piutang Factoring</i>	582
Keuntungan Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> )	572	Perkembangan Pembiayaan Anjak Piutang	582
Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Perjanjian Lain	572	<b>Bab 16 Modal Ventura 583</b>	
<i>Perbedaan Dengan Jual Beli</i>	572	Pengertian	583
<i>Perbedaan Dengan Sewa-menyewa</i>	573	Sejarah Modal Ventura	584
<i>Perbedaan Dengan Sewa Beli</i>	574	Sejarah Awal Mula Modal Ventura Modern	585
Perkembangan Pembiayaan Sewa Guna Usaha	574	Di Indonesia	585
<b>Bab 15 Anjak Piutang 575</b>		Sejarah Modal Ventura Di Indonesia	585
Latar Belakang Sejarah	575	Para Pihak Dalam Modal Ventura	586
Pengertian	575	<i>Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital</i>	
Pihak-Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang	576	<i>Company)</i>	586
Mekanisme Kegiatan	576	<i>Perusahaan Pasangan Usaha (Inverstee</i>	
<i>Disclosed Factoring</i>	576	<i>Company)</i>	587
<i>Undisclosed Factoring</i>	576	<i>Penyandang Dana</i>	587
Penanggung Risiko Macet	576	Kewajiban Para Pihak	588
<i>Recourse (With Recourse)</i>	576	<i>Kewajiban Perusahaan Modal Ventura</i>	588
<i>Non recourse (Without Recourse)</i>	577	<i>Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha</i>	588
Jenis Anjak Piutang	577	Ketentuan-Ketentuan Dalam Modal Ventura	590
<i>Piutang Untuk Tagihan</i>	577	Kegiatan Usaha Modal Ventura	590
<i>Piutang Untuk Promes</i>	577	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh PVMD	591
Jasa-Jasa Anjak Piutang	577	Manfaat Modal Ventura	592
Biaya-Biaya	578	<i>Bagi Perusahaan Pasangan Usaha</i>	592
<i>Service Charge</i>	578	<i>Bagi Perusahaan Modal Ventura</i>	592
<i>Discount Charge</i>	578	Jenis Berdasarkan Cara Pemberian Bantuan Mekanisme	
Manfaat Bagi Supplier	578	Modal Ventura Dapat Dibedakan Menjadi:	592
Ruang Lingkup Transaksi	578	<i>Single Tier Approach</i>	592
<i>Transaksi Dalam Negeri (Domestic)</i>	578	<i>Two Tier Approach</i>	592
<i>Transaksi Internasional,</i>	578		



Berdasarkan Cara Penghimpunan Modal Ventura Dapat Dibedakan Menjadi Dua	592
<i>Leverage Venture Capital</i>	593
<i>Equity Venture Capital</i>	593
Berdasarkan Kepemilikan, Perusahaan Modal Ventura Dapat Dibedakan Dalam Beberapa Jenis	593
<i>Private Venture-Capital Company</i>	593
<i>Public VentureCapital Company</i>	593
<i>Bank Affiliate Venture-Capital Company</i>	593
<i>Conglomerate Venture Capital Company</i>	594
Perbedaan Perusahaan Modal Ventura Dengan Lembaga Pembiayaan Dengan Pinjaman	594

## **Bab 17 Pegadaian 595**

Pendahuluan	595
Pengertian Gadai	596
Organisasi dan Tata Kerja	597
Tugas dan Fungsi Pokok	598
<i>Menejer Kantor Cabang</i>	599
<i>Penaksir Barang Jaminan</i>	599
<i>Kasir</i>	599
<i>Penjaga Gudang</i>	599
<i>Penyimpan Barang Jaminan Emas</i>	599
<i>Petugas Tata Usaha</i>	600
Kegiatan Usaha	600
<i>Pinjaman Usaha Gadai</i>	600
<i>Usaha Syariah</i>	603
Produk Unit Layanan Pembiayaan	605
<i>KCA (Kredit Cepat Aman)</i>	605
<i>Krasida</i>	607
<i>Kreasi</i>	608
<i>Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)</i>	609
<i>Kresna (Kredit Serba Guna)</i>	609
<i>Kredit Kagum</i>	610
<i>Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)</i>	611
<i>Rahn</i>	611
<i>Arrum</i>	614
<i>Kredit Amanah</i>	615
Produk Unit Layanan Jasa Lainnya	615
<i>Jasa Taksiran</i>	615
<i>Jasa Titipan</i>	616
<i>Jasa Lelang</i>	616
<i>Pegadaian Persewaan Gedung</i>	616
<i>Unit Gadai Efek</i>	616

<i>Kucica</i>	617
<i>MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)</i>	617
<i>Pegadaian G-Lab (Unit laboratorium Gemologi)</i>	619
<i>Pegadaian 24</i>	619
<i>Multi Payment Online (MPO)</i>	619
<i>Galeri</i>	619
<i>Megatasi Masalah Tanpa Masalah</i>	622
<i>Unit Pelayanan Operasional</i>	622
<i>Jumlah Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Konvensional</i>	622
<i>Jumlah Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Syariah</i>	623
<i>Sumber Dana</i>	624
<i>Penyaluran Dana</i>	624
<i>Peningkatan Pelayanan</i>	625
<i>Perkembangan Usaha</i>	625
<i>Pendapatan Usaha</i>	625
<i>Beban usaha</i>	626
<i>Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih</i>	626
<i>Laba Bersih</i>	626
<i>Rasio Rentabilitas, Profit Margin, Rasio Operasi, dan Rasio Produktivitas</i>	627
<i>Rasio Likuiditas dan Solvabilitas</i>	627
<i>Prosedur Memperoleh Pinjaman</i>	628
<i>Prosedur Pengembalian Pinjaman</i>	629
<i>Lelang Barang Jaminan</i>	629
<i>Nasabah Utama</i>	630
<i>Sumber Daya Manusia</i>	630
<i>Profil Sumber Daya Manusia</i>	630
<i>Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	631
<i>Budaya Kerja Intan</i>	631
<i>Pelatihan dan Pengembangan</i>	632

## **Bab 18 Asuransi 635**

Fungsi Asuransi	635
<i>Pengalihan Risiko</i>	635
<i>Penghimpunan Dana</i>	636
<i>Penyeimbangan Premi</i>	636
Tujuan Asuransi	636
Pengertian Asuransi	636
Sejarah Asuransi	638
Penggolongan Asuransi	638



Asuransi Jiwa ( <i>Life Insurance</i> )	639	<i>Peserta Dalam Program Dana Pensiun</i>	674
Asuransi Kerugian	645	<i>Dua Jenis Lembaga</i>	674
Asuransi Sosial	648	<i>Dana Pensiun Pemberi Kerja</i>	675
Pilih Asuransi Kebongkaran untuk Jaminan Harta Benda	649	<i>Dana Pensiun Lembaga Keuangan</i>	675
Asuransikan Sepeda Motor	650	<i>Iuran Dana Pensiun</i>	677
Asuransi Mobil yang Tepat	651	<i>Tiga Asas Pengelolaan Dana Pensiun</i>	678
Asuransi Rumah: Menguntungkankah?	653	<i>Kebersamaan</i>	678
Kiat Mudah Asuransi Pendidikan	654	<i>Keadilan</i>	678
Asuransi Kesehatan	655	<i>Kesederhanaan</i>	678
<i>BPJS Kesehatan</i>	658	<i>Manfaat Dana Pensiun</i>	678
<i>Sejarah Singkat BPJS Kesehatan</i>	658	<i>Manfaat Pensiun Normal</i>	678
<i>Kepesertaan Wajib</i>	659	<i>Manfaat Pensiun Dipercepat</i>	678
<i>Hak dan Kewajiban BPJS</i>	659	<i>Manfaat Pensiun Cacat</i>	678
Hak BPJS	660	<i>Manfaat Pensiun Ditunda</i>	679
Usaha Penunjang Usaha Asuransi Yang Terdiri Dari:	661	<i>Peserta Dana Pensiun</i>	679
Reasuransi	661	<i>Kewajiban Peserta</i>	679
Pentingnya Asuransi	662	<i>Hak Peserta</i>	679
<i>Manfaat Asuransi Sesuai Kebutuhan</i>	663	<i>Prosedur DP Lembaga Keuangan</i>	679
<i>Keuntungan</i>	663	<i>Karakteristik DPLK</i>	681
<i>Kerugian</i>	663	<i>Faktor Penghambat DPLK</i>	682
<i>Risiko Asuransi</i>	664	<i>Asuransi</i>	682
<i>Penggolongan Risiko</i>	664	<i>Kebijakan dan Peraturan</i>	682
Menejemen Risiko	664	<i>Pemasaran</i>	682
Karakteristik Risiko yang Dapat Diasuransikan	664	<i>Kompetitors</i>	682
Polis Asuransi	665	<i>Pendirian Dana Pensiun</i>	683
Doktrin Asuransi	666	<i>Pendiri Dana Pensiun</i>	683
Pembinaan dan Pengawasan Industri		<i>Kewajiban Pendiri</i>	683
<i>Perasuransian</i>	666	<i>Wewenang Pendiri</i>	683
Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Memiliki Program Seruty Bond	667	<i>Hak Pendiri</i>	683
<b>Bab 19 Dana Pensiun 669</b>		<i>Dewan Pengawas Dana Pensiun</i>	683
<i>Pengertian Dana Pensiun</i>	670	<i>Persyaratan Dewan Pengawas</i>	683
<i>Manfaat Dana Pensiun</i>	670	<i>Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas</i>	684
<i>Prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun</i>	673	<i>Kewajiban Dewan Pengawas</i>	684
<i>Prinsip Kejelasan Maksud dan Tujuan Program</i>	673	<i>Pengurus Dana Pensiun</i>	684
<i>Prinsip Independensi</i>	673	<i>Syarat Pengurus</i>	684
<i>Prinsip Akuntabilitas</i>	673	<i>Wewenang Pengurus</i>	684
<i>Prinsip Transparansi</i>	673	<i>Kewajiban Pengurus</i>	685
<i>Prinsip Perlindungan Terhadap Konsumen</i>	673	<i>Tanggung Jawab Pengurus</i>	685
<i>Prinsip Struktur Pengendalian Interen</i>	674	<i>Mitra Pendiri Dana Pensiun</i>	686
<i>Prinsip Kualifikasi Penyelenggara</i>	674	<i>Kewajiban Mitra Pendiri</i>	686
		<i>Hak Mitra Pendiri</i>	686
		<i>Pembentukan dan Pembubaran Dana Pensiun</i>	686
		<i>Peoses Pembentukan Dana Pensiun</i>	686
		<i>Proses Pembubaran Dana Pensiun</i>	689



Perkembangan Industri Dana Pensiun	691	Program Keuangan Inklusif	712
Lima Tahun Pertama: Masa Pertumbuhan	691	Gerakan Indonesia Menabung (GIM)	712
Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Industri Dana Pensiun	691	Tabunganku	713
Industri Dana Pensiun: Sekarang dan ke Depan	692	Layanan Keuangan Digital (LKD)	714
Industri Dana Pensiun di Indonesia	693	Financial Identity Number (FIN)	715
Tata Kelola Dana Pensiun	693	Sistem Informasi Bagi Petani & Nelayan (SIPN)	716
Maksud dan Tujuan	694	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pemerintah (GTOP)	718
Penyusunan Regulasi	694	Remitansi	719
Arah Regulasi	695	<b>Daftar Pustaka</b>	<b>721</b>
Tata Kelola Dana Pensiun	696	<hr/>	
Road Map Industri Dana Pensiun: Arah ke Depan		<b>Indeks</b>	<b>727</b>
Pengembangan Dana Pensiun di Indonesia	697	<hr/>	
Meningkatkan Fleksibilitas Skema Dana Pensiun	697		
Meningkatkan Kepastian Hukum Penyelenggaraan Dana Pensiun	697		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dana Pensiun	698		
Memperkuat Pengawasan Dana Pensiun	698		
Tiga Jenis Program Dana Pensiun	698		
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP),	700		
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP),	700		
Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)	700		
Alternatif Program Pensiun Lain	700		
Cash Balance Plan:	701		
Floor-Offset Plan:	701		
Money-Purchase Plan:	701		
Target-Benefit Plan:	701		
Investasi Dana Pensiun	702		
Prospek Dana Pensiun	702		
<b>Bab 20 Keuangan Inklusif</b>	<b>705</b>		
Apa itu Keuangan Inklusif	705		
Apa itu Keuangan Inklusif	706		
Mengapa Perlu Keuangan Inklusif	706		
Bagaimana Penerapan Keuangan Inklusif?	707		
Siapa Saja Yang Menerapkan Keuangan Inklusif	707		
Strategi Nasional Keuangan Inklusif	708		
Peran Bank Indonesia	709		
Indeks Keuangan Inklusif	710		
Dimensi Akses	710		
Dimensi Penggunaan	711		